

Judul : Polemik Ribuan ASN Jadi Komcad
Tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Polemik Ribuan ASN Jadi Komcad

Pelatihan bagi 4.000 ASN untuk menjadi komponen cadangan bakal dimulai April 2026. Rencana ini menuai polemik karena kultur militeristik komcad tidak sesuai dengan jiwa pelayanan ASN kepada masyarakat.

Hidayat Salam dan Nino Citra Anugrahanto

Rencana pelatihan ribuan aparatur sipil negara untuk menjadi komponen cadangan menuai polemik. Di satu sisi ada yang mendukung karena menjadi bagian dari strategi pertahanan menyeluruh. Namun, di sisi lain, ada yang menolak pola pelatihan militeristik pada birokrasi sipil karena berpotensi menimbulkan sejumlah efek.

Rencana pelatihan aparatur sipil negara (ASN) menjadi komponen cadangan (komcad) diberikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retreat di Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Tak tanggung-tanggung, 4.000 ASN dari 49 kementerian dan lembaga di Jakarta akan mulai dilatih pada semester pertama 2026 ini. "Kita bagi setiap triwulan sehingga nanti pada saat semester pertama kita sudah mempunyai komponen cadangan cukup besar. Itulah proyeksi bagaimana negara harus mempertahankan dirinya," ujar Sjafrie.

Pelatihan ASN menjadi komcad disebutnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta Tanah Air dalam menghadapi negara. Dengan begitu, semangat mereka untuk melayani masyarakat dan negara bisa semakin tinggi pula. Sesuai pelatihan, para ASN akan dipulangkan ke instansi dan lembaganya masing-masing. Mereka tidak akan diproyeksikan untuk menggantikan tugas TNI. Terlebih hubungan fungsi untuk menjadi ujung tombak keamanan negara.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, Selasa (3/2), mengatakan, rencana keikutsertaan ASN untuk dilatih menjadi komcad bersifat sukarela, bukan paksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Pelatihan komcad bagi ASN, menurut dia, merupakan bagian dari kebijakan penguatan sistem pertahanan negara yang telah memiliki landasan hukum. Kebijakan itu telah dijalankan sejak 2021. Hingga 2025, program itu sudah diikuti 1.333 ASN di Kementerian.

Secara kebijakan, keterlibatan ASN selaras dengan agenda bela negara dan prioritas nasional di bidang pertahanan, dengan tujuan menanamkan kesiapan SDM pendukung komponen utama apabila dibutuhkan, memperkuat ketahanan internal institusi terhadap ancaman nirmiliter, serta membangun disiplin dan etos kerja," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksmono mendukung langkah pemerintah melatih ASN menjadi komcad. Meski demikian, kebijakan tersebut mesti dijalankan dengan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan tetap mengutamakan tugas utama ASN sebagai pelayan masyarakat.

"Yang terpenting semangat kebersamaan, yaitu bahwa pertahanan negara bukan hanya tugas militer, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa," katanya.

Ia menjelaskan, konsep *total defense* atau pertahanan menyeluruh kini sudah menjadi tren global di banyak negara. Dalam konsep tersebut, seluruh lapisan masyarakat, termasuk ASN, diberikan pemahaman dan keterampilan dasar un-



Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) pulang dari kantor di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (2/2/2026). Hingga pertengahan 2026, Kementerian Pertahanan berencana melatih sekitar 4.000 ASN di 49 kementerian dan lembaga negara di Jakarta untuk menjadi anggota komponen cadangan.

trik mendukung kedaulatan negara dalam situasi darurat.

Namun, ia juga mengingatkan pemerintah untuk merancang mekanisme kepesertaan secara bijak dan hati-hati sehingga tetap memastikan fungsi utama ASN, yakni sebagai pelayan publik, tidak terganggu selama agenda komcad itu.

Sementara anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mengingatkan pentingnya sinkronisasi regulasi agar pelatihan komcad tidak berbenturan dengan aturan kepegawaian yang sudah ada.

"Mekanisme mesti diperjelas. Perencanaannya harus kompatibel dengan regulasi lainnya, termasuk UU ASN. Yang paling penting adalah

menjauhi pada sistem meritokrasi yang berdampak langsung pada kemampuan dan kinerja ASN," ujar Syamsu.

Meski bersifat sukarela, menurut dia, program ini sebaiknya tidak sekadar ajang latihan kedisiplinan fisik, tetapi juga harus terintegrasi dengan sistem meritokrasi ASN.

"Jika dikaitkan dengan reward sesuai merit system, keikutsertaan dalam komcad pasti akan memberikan manfaat bagi administrasi, kepemimpinan, dan remunerasi ASN," tutur Syamsu.

Bukan solusi

Di sisi lain, rencana melatih ASN menjadi komcad menuai kritik dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil.

"(Pelatihan ASN menjadi) komcad tidak menjawab masalah yang kita hadapi saat ini, yaitu korupsi dan kemiskinan. Anggaran untuk pelatihan lebih baik untuk pelayanan masyarakat dan mengatasi pengangguran," kata Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Agus Pramuisanto.

Saat ini, sebut Agus, masyarakat lebih membutuhkan ASN yang berintegritas. Dia mencontohkan, wujud integritas itu terlihat dari prinsip anti-korupsi yang dipegang teguh. Raginya, sikap semacam itu hanya bisa ditularkan dengan teladan yang diberikan dari jajaran pimpinan.

Mantan Ketua Komisi ASN ini turut mengomentari peri-

hal penanaman nasionalisme yang dijadikan alasan pelatihan komcad untuk ASN. Ia menilai, nasionalisme hanya akan terbentuk jika seseorang memiliki ruang untuk berekspresi dan didengar, tanpa ada penggunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Jawa ASN adalah pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Bukan jiwa patah perintah atasan semata," ujarnya.

Di sisi lain, Agus juga menyoroti ikatnya kultur komando dan komcad yang terkesan militeristik. Dalam hal ini, wacana pelatihan justru berkebalikan dengan semangat pelayanan publik. Sebagai tugas utamanya, ASN diharuskan menekankan aspek demokratis dalam layanan publik.

"Kultur komando beda dengan kultur pelayanan. ASN harus mengutamakan pelayanan publik yang demokratis. Ketika warga tidak puas dengan pelayanan, mereka punya ruang untuk mengadu. Itulah demokrasi dalam pelayanan publik," kata Agus.

Militerisasi di ranah sipil

Wacana pelatihan komcad kepada ribuan ASN itu juga dipertanyakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Kebijakan itu dinilai sebagai militerisasi dalam ranah sipil yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Apalagi pemisahan antara sipil dan militer telah diamanatkan dalam reformasi yang diperjuangkan banyak orang pada 1998.

"Bela negara juga tidak semestinya disederhanakan menjadi pendekatan militeristik. Pembentukan komcad ini mencerminkan paradigma yang usang," kata Usman.

Ihwal paradigma pertahanan itu, Usman menilai, pemerintah semacam terpacu pada imajinasi perang konvensional. Seolah olah perang semata-mata membutuhkan mobilisasi massa. Padahal, ancaman serangan modern bergerak ke ruang-ruang siber yang menuntut kecakapan teknologi, tidak melulu berkuat pada urusan perang fisik.

Pelatihan komcad yang memakan anggaran besar, menurut dia, juga tidak sesuai dengan kondisi perekonomian terkini. Semestinya alokasi anggaran ditujukan untuk keperluan pertahanan yang jauh lebih strategis, seperti untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas TNI.

Lebih dari itu, ia khawatir pelatihan komcad bakal menanamkan kultur kekerasan dalam birokrasi dan masyarakat.